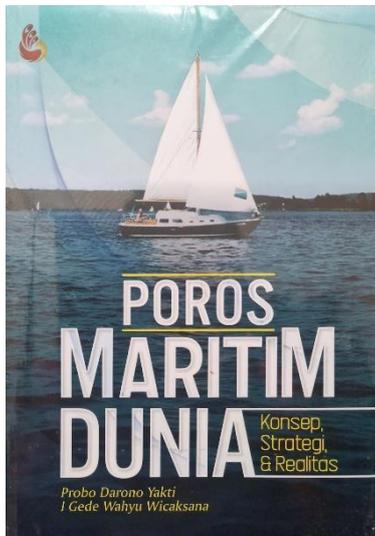


Konsep, Strategi, dan Realita Poros Maritim Dunia: Sebuah Resensi Buku

Maula Hudaya
Universitas Diponegoro



Judul	: Poros Maritim Dunia: Konsep, Strategi, dan Realitas
Penulis	: Probo Darono Yakti dan I Gede Wahyu Wicaksana
Penerbit	: Intrans Publishing
Cetakan	: 2021
Tebal	: 256 halaman

Buku ini menyoroti visi sekaligus kebijakan utama Presiden Joko Widodo pada periode pertamanya yakni Poros Maritim Dunia (PMD) melalui sudut pandang yang unik. Penulis membedah PMD ke dalam tiga tataran yang berbeda namun saling berkesinambungan yaitu konsep, strategi, dan realita bagaimana visi tersebut berusaha untuk dicapai. “Kita sudah terlalu lama memunggungi laut, samudera, selat, dan teluk”, potongan pidato pelantikan Presiden Joko Widodo tersebut menyiratkan keinginan kuat untuk mengembalikan Indonesia pada kodratnya sebagai negara maritim. Bagaimana tidak, dalam buku ini penulis menyatakan bahwa Indonesia telah lama mengenakan identitas sebagai negara agraris dibandingkan maritim. Bahkan terminologi maritim sendiri dianggap inferior dan rendah. Pandangan tersebut telah terkonstruksi sejak era pendudukan Belanda, di mana para penguasa kolonial saat itu berusaha

menjauhkan masyarakat Indonesia dari lautan dan menanamkan identitas bangsa agraris.

Oleh karena, itu penulis melihat perlunya studi terkait strategi maritim di Indonesia untuk dibumikan. Caranya adalah dengan mengupas bagaimana perkembangan kajian strategi maritim di Indonesia berkembang dari suatu hal yang 'rendahan' kemudian berubah menjadi kajian eksklusif yang hanya dipelajari oleh segelintir golongan elit, hingga pada akhirnya dapat menyentuh masyarakat luas. PMD sendiri dimaknai oleh pemerintah sebagai *fulcrum* alih-alih *axis* maupun *nexus*. Artinya, Indonesia ingin menjadi pusat aktivitas kelautan global, di mana hal ini adalah manifestasi dari budaya strategis Indonesia, yaitu pilihan strategis yang diambil Indonesia sebagai negara maritim dengan letak geografis begitu strategis untuk menghadapi tantangan di lingkungan strategisnya, yaitu munculnya kekuatan maritim baru di kawasan.

Sepanjang sejarah, telah bermunculan banyak negara yang berhasil mencapai hegemoni kemaritiman dengan konsepnya masing-masing. Republik Minoa, Bangsa Funisia, dan Kekaisaran Mesir dengan konsep *sea power* atau talasokrasinya merupakan pionir dalam bangkitnya supremasi negara dalam ranah kekuatan maritim. Ketiganya berhasil mencapai penguasaan penuh terhadap Laut Tengah melalui kekuatan Angkatan laut yang mumpuni, kemudian memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui perdagangan maritim di laut yang telah diamankan tersebut. Konsep hegemoni negara maritim selanjutnya yang dijelaskan oleh penulis adalah Mandala Kadatuan Sriwijaya dan Mancanegara Kekaisaran Majapahit. Berbeda dengan Minoa, Funisia, dan Mesir, Sriwijaya tidak berusaha menguasai seluruh wilayah lautan di sekitarnya, namun hanya memastikan keamanan jalur pelayaran sehingga pedagang dari negara-negara mitra dapat berlayar dengan aman. Dengan kata lain konsep Mandala Kadatuan tidak berusaha menciptakan kontrol absolut namun lebih menekankan pada terciptanya hubungan patron-klien dengan Sriwijaya sebagai pusatnya. Mirip dengan Sriwijaya, Majapahit dengan konsep Mancanegaranya juga menerapkan sistem yang serupa. Majapahit memungut upeti dari kerajaan-kerajaan kliennya yang tersebar di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara saat ini, sebagai gantinya Kekaisaran memastikan keamanan seluruh kliennya termasuk di wilayah lautan yang menghubungkan antara pusat kekaisaran dan para klien tersebut.

Beranjak ke era yang lebih modern, sejak era kolonial hingga saat ini, terdapat dua era hegemoni kemaritiman yang paling berpengaruh yaitu Pax Britannica dan Pax Americana. Tidak seperti era-era sebelumnya yang hanya mampu mencapai hegemoni maritim secara kewilayahan, Pax

Britannica maupun Pax Americana berhasil mencapai hegemoni global atau dalam konsepsi Alfred Thayer Mahan (1890) dikenal sebagai *Command of The Sea*. Kapabilitas Angkatan laut yang mumpuni dimanfaatkan Inggris untuk membentuk koloni dan mengamankan jalur-jalur perdagangan penting. Kemudian dengan kekuasaannya, kerajaan Inggris mampu membentuk kekaisaran informal dengan kuasa penuh untuk menggerakkan kekuatan angkatan laut negara-negara koloninya. Amerika Serikat di sisi lain, pada awalnya hanya memusatkan kekuatan angkatan lautnya untuk menjauhkan kekuatan maritim lain dari wilayah Amerika Selatan. Setelah berhasil, Amerika Serikat mengisolasi diri untuk membangun kekuatannya hingga memadai untuk membangun angkatan laut secara besar-besaran dan kemudian menguasai banyak titik penting di laut dunia hingga saat ini.

Lantas konsep kekuatan maritim mana yang akan dianut Indonesia yang berambisi untuk menjadi pusat dari seluruh aktivitas maritim di dunia? Menjadi negara maritim merupakan konsekuensi dari bentuk negara kepulauan yang memang sudah disadari sejak awal kemerdekaan. Meski demikian, pandangan elit pemerintahan mengenai seperti apa bentuk negara kepulauan tersebut harus dimaknai juga menjadi faktor penentu akan menjadi seperti apa strategi maritim yang diterapkan oleh Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yakti dan Wicaksana dalam buku ini membagi perkembangan strategi maritim Indonesia ke dalam dua periode yaitu sebelum dan setelah munculnya PMD. Citra diri sebagai negara archipelago telah terbentuk pada era sebelum PMD, pada era pemerintahan Presiden Soekarno yang salah satunya ditandai oleh Deklarasi Djuanda pada 1957 yang melahirkan salah satu budaya strategis Indonesia yaitu Wawasan Nusantara. Pada masa tersebut, strategi kemaritiman dan pembangunan kekuatan angkatan laut mendapat perhatian besar. Hal ini juga dilandasi oleh latar belakang situasi ancaman yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki kekuatan laut yang mumpuni, di mana pada era tersebut Indonesia harus kembali menghadapi Belanda untuk membebaskan wilayah Irian Barat. Meski demikian, pada era Orde Baru, strategi kemaritiman kembali termarginalkan. Strategi maritim hanya menjadi subordinasi dari strategi darat. Bahkan Angkatan Laut pada masa itu, bergerak di bawah komando Angkatan Darat. Hingga era reformasi pun, posisi strategi maritim tak banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh citra diri sebagai negara kepulauan yang memandang laut dan posisi geografis negara sebagai persimpangan antara dua benua dan dua samudera alih-alih sebagai pemersatu, namun justru sebagai pemisah.

Pandangan inilah yang berusaha diubah oleh Joko Widodo melalui PMD-nya. Banyak diilhami oleh pernyataan-pernyataan Presiden

Soekarno, Presiden ketujuh Republik Indonesia tersebut berusaha mengembalikan pandangan bahwa laut adalah elemen pemersatu sekaligus ladang kesempatan di tengah situasi internasional yang sedang dihadapi. Sebagai persimpangan maritim tersibuk di dunia, Indonesia memiliki jalur-jalur perdagangan maritim strategis yang menjanjikan keuntungan begitu besar. Terlebih lagi, luasnya wilayah lautan Indonesia juga menyediakan sumber daya begitu berlimpah yang mampu untuk mendukung kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, selain untuk menjawab tantangan di sistem internasional dengan munculnya *Belt and Road Initiative* serta *Indian Ocean Rim Association* yang menunjukkan tengah bangkitnya geopolitik dan geoekonomi kemaritiman di kawasan, PMD juga didesain sedemikian rupa untuk memaksimalkan potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia tersebut. Upaya untuk meraih keuntungan dari kondisi-kondisi tersebut diejawantahkan ke dalam lima pilar PMD yaitu Budaya Maritim, Konektivitas dan Infrastruktur Maritim, Pengolahan Sumber Daya Laut, Pertahanan dan Keamanan Maritim, dan Diplomasi Maritim.

Lima pilar PMD menjadi fokus pembangunan pada era Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai *fulcrum* dari aktivitas kemaritiman dunia. Meski kelima pilar tersebut sama penting, namun saya melihat bahwa terdapat dua pilar yang perlu mendapat perhatian khusus dan diprioritaskan dalam proses pembangunannya yaitu Budaya Maritim serta Pertahanan dan Keamanan Maritim. Sebagaimana diungkapkan oleh penulis pada bab pertama buku ini, membumikan kajian terkait kemaritiman sangat diperlukan untuk membangun budaya maritim yang kuat. Meminjam konsepsi budaya strategis milik Johnston (1995), dengan demikian diskursus mengenai kemaritiman akan tertanam ke dalam pikiran masyarakat dan pengambil kebijakan, sehingga terbentuk budaya berpikir yang berorientasi kemaritiman. Hal ini akan menjadi opsi strategis yang secara otomatis masuk ke dalam pemikiran para pengambil kebijakan, sehingga kebijakan apapun yang akan dirumuskan akan memiliki orientasi kemaritiman.

Pilar prioritas selanjutnya adalah penguatan Pertahanan dan Keamanan Maritim. Sebelum berbicara mengenai pembangunan infrastruktur yang mendukung terciptanya konektivitas maritim, ataupun tentang pengolahan sumber daya laut yang memadai, memastikan lautan kita aman dari ancaman yang berpotensi mengganggu pembangunan kedua sektor tersebut menjadi lebih utama. Konsekuensi dari bentuk negara archipelago yang begitu luas namun tidak memberi perhatian yang cukup terhadap sektor maritim adalah menjamurnya ancaman-ancaman non tradisional di wilayah perairannya yang begitu luas. Penulis sendiri

telah menjabarkan mengenai *Illegal, Unreported, Unreported (IUU) Fishing* yang mengancam pilar Pengelolaan Sumber Daya Laut, akan tetapi masih ada ancaman-ancaman non-tradisional lain yang menghantui laut Indonesia. Perompakan dan terorisme maritim tergolong masih marak terjadi di perairan kita di mana perairan Selat Malaka di dekat Kepulauan Riau dan Perairan di dekat perbatasan dengan Filipina menjadi *hotspot* terjadinya kedua ancaman non-tradisional tersebut (Hudaya & Putra, 2017). Oleh karena itu, pembangunan dan modernisasi Angkatan Laut dengan visi menjadi *World Class Navy* pada 2024 serta adanya sinergi dengan otoritas keamanan laut lain seperti Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut sangat diperlukan untuk menciptakan situasi kondusif untuk dapat mewujudkan pilar-pilar PMD yang lain.

Terpenuhinya kelima pilar PMD membawa Indonesia semakin dekat pada visinya untuk menjadi *fulcrum*, yang dilihat oleh penulis akan turut mengubah orientasi strategi kemaritiman Indonesia yang cenderung *inward looking* menjadi *outward looking*. Hal ini disebabkan oleh pemaknaan PMD sebagai *fulcrum* atau pusat aktivitas kemaritiman dunia sehingga harus mengubah trayektori strategi kemaritiman Indonesia untuk menjadi kekuatan penyeimbang dalam percaturan geopolitik dan geoekonomi kemaritiman global. Meski demikian, sebagai kesinambungan dari konsepsi negara maritim Sriwijaya dan Majapahit orientasi *outward looking* tak serta merta mengubah doktrin Angkatan Laut menjadi *blue water navy* agresif dengan berusaha menciptakan kontrol absolut di perairan kawasan atau disebut sebagai *Command of the Sea* menurut Alfred Thayer Mahan (1898), namun lebih ditujukan untuk mewujudkan kontrol terbatas yang cukup untuk menghalau ancaman dan memberikan keamanan akses bagi jalur perdagangan strategis, sebagaimana Sir Julian Corbett (2008) memaknai *Sea Control*.

Selain itu, terdapat pandangan lain bahwa orientasi Indonesia pada era PMD tidak sepenuhnya *outward looking*, namun terdapat juga kecenderungan *inward looking*. Pandangan tersebut didasarkan pada penerapan pilar pertahanan dan keamanan maritim di mana penindakan terhadap ancaman keamanan non-tradisional cenderung hanya berfokus pada IUU Fishing yang memiliki dampak langsung pada perekonomian Indonesia. Di sisi lain, ancaman lain khususnya perompakan jarang memperoleh perhatian serius (Hudaya, 2018). Sikap tersebut menunjukkan bahwa meskipun dirancang untuk menyeimbangkan kekuatan geopolitik dan geoekonomi kemaritiman di tataran global, namun PMD masih memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dengan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari dalam negeri terlebih

dahulu dibandingkan dengan memanfaatkan kondisi geoekonomi dengan menyerap keuntungan dari luar.

Secara garis besar buku ini sangat menarik dan dapat berkontribusi bagi para pengambil kebijakan, akademisi, maupun masyarakat umum untuk memahami PMD, konsep strategi maritim, serta sejarah dan latar belakang situasi yang mendasari penerapannya. Sesuai dengan judul bab pertamanya, buku ini dapat disebut sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali budaya maritim Indonesia dengan dijelaskannya perjalanan Indonesia sebagai negara maritim secara terperinci. Jika penulis berniat untuk menerbitkan kembali versi lanjutan dari buku ini, maka akan sangat menarik jika edisi selanjutnya difokuskan untuk membedah pilar-pilar PMD khususnya dua pilar yang telah memperoleh sorotan pada tulisan resensi buku ini.

Daftar pustaka

- Corbett, J. (2008). Some principles of maritime strategy. Dalam: T. Mahnken, J. Maiolo and J.A. Maiolo (Eds.). (2008). *Strategic Studies: A Reader*. London: Routledge.
- Hudaya, M. dan Putra, A.T. (2017). Toward Indonesia as global maritime fulcrum: correcting doctrine and combating non-traditional maritime threats. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10 (2), pp. 72-85.
- Hudaya, M. (2018). *Securing ASEAN Waters: The Indonesia's Strategic Culture Perspective*. Dalam: C. Hennida et al (2018). *Regional Dynamics in Southeast Asia*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Mahan, A.T. (1898). *The Influence of Seapower Upon History*. Boston: Little Brown.